

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi sistem pendidikan nasional dari sentralistik menuju ke sistem desentralistik (otonomi sekolah) merupakan suatu langkah yang perlu segera direalisasikan. Desentralisasi pendidikan berdasarkan otonomi sekolah, akan mampu mengurangi atau menghilangkan sikap diskriminatif pemerintah terhadap sekolah-sekolah negeri dan swasta. Bahkan bila perlu status negeri yang selama ini melekat pada lembaga-lembaga pendidikan pemerintah dihapuskan. Hal tersebut dapat mengurangi intervensi pemerintah terhadap sekolah secara berlebihan, selain itu juga untuk pemerataan kemajuan di semua lembaga pendidikan.

Eksistensi sekolah-sekolah negeri memberi kemungkinan lebih besar terhadap tumbuh suburnya sistem pendidikan sentralistik. Ekonom Amerika, Friedman, sebagaimana dikutip oleh Zamroni, mengatakan bahwa sekolah-sekolah harus diorganisir secara desentralistik, bahkan lebih ekstrem lagi sekolah harus mandiri dalam melaksanakan pendidikannya. Jika lembaga-lembaga pendidikan diberi wewenang yang lebih besar, maka diharapkan mereka akan bersaing dengan sehat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian, bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab terhadap pendidikan, melainkan tetap bertanggung jawab sebagai fasilitator,

mediator, monitor, dan yang terpenting adalah sebagai penyandang dana pendidikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Selama masa rezim orde baru, sistem sentralisasi pendidikan telah menyebabkan pendidikan tidak terfokus pada tujuan utama sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada waktu itu, pendidikan sering dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Di samping itu, banyak terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan, misalnya mutu pendidikan antara daerah atau propinsi satu dengan yang lain tidak merata dan pendidikan yang berkualitas berpusat di pulau Jawa. Sentralisasi pendidikan juga menghilangkan daya kreativitas. Sikap inovatif dari para praktisi pendidikan terutama di tingkat sekolah sangat rendah. Mereka bekerja selalu menunggu petunjuk dari atasan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan mendasar yang dirasakan dalam dunia pendidikan saat ini adalah adanya sistem manajemen desentralistik, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sekarang dikenal suatu istilah baru dalam manajemen pendidikan, yakni Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) muncul sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Eksistensi peningkatan mutu pendidikan di sekolah menjadikan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan

lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan *output*-nya. Menurut Sudarwan Danim, kepala sekolah memiliki multiperan, yakni; sebagai *administrator, manager, leader, chief, motivator, negosiator, figure, communicator*, wakil lembaga dalam urusan eksternal dan fungsi-fungsi lainnya. Menurut Mulyasa, Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu memainkan perannya sebagai *educator, manager, administrator, dan supervisor*. Bahkan ada peran tambahan lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni; sebagai *leader, innovator, motivator, figure* dan *mediator*. Jadi implementasi peningkatan mutu pendidikan sangat menuntut sikap kreatif, inovatif, dan sikap profesionalisme kepala sekolah yang cukup besar.

Melihat begitu penting suatu lembaga pendidikan mengatur diri secara mandiri dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan melihat begitu besar peran kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan riset dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan mutu di SMA Negeri 1 Kabaena”. SMA Negeri 1 Kabaena adalah sebuah sekolah dengan pemimpin seorang kepala sekolah laki-laki yang berusaha menerapkan peningkatan mutu pendidikan. Implementasi peningkatan mutu pendidikan ini dipicu oleh kemauan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Di samping itu, implementasi peningkatan mutu pendidikan juga didorong oleh persaingan yang cukup ketat di antara sekolah-sekolah di daerah tersebut khususnya, dan di Daerah Sulawesi Tenggara pada

umumnya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi Sekolah di hati masyarakat dan untuk peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah berinisiatif untuk menerapkan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Negeri Kabaena.

Menurut pengakuan kepala sekolah, implementasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini telah berjalan sejak tahun 2005. Namun berdasarkan hasil pra-riset, belum banyak warga sekolah ini yang mengetahui tentang kebijakan kepala sekolah menerapkan peningkatan mutu pendidikan, bahkan sebagian mereka pun belum tahu apa itu peningkatan mutu pendidikan. Pada saat penelitian ini berlangsung, warga sekolah masih mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan proses pendidikan sebagai dampak dari krisis ekonomi. Beberapa ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan tidak dapat digunakan lagi karena kondisinya mengkhawatirkan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan riset tentang peran kepala sekolah dalam implementasi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabaena.

Mengingat peran kepala sekolah begitu banyak yang harus dijalankan maka dalam riset ini penulis akan lebih memfokuskan pada peran kepala sekolah sebagai manajer, namun tanpa mengabaikan peran yang lainnya, artinya peran kepala sekolah sebagai *manager* akan dibahas secara lebih luas dari pada peran-peran yang lain.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan dan rumusan masalah adalah dua istilah yang nampak sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. Permasalahan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, sedangkan rumusan masalah adalah sebuah atau beberapa pertanyaan yang dirumuskan untuk dijadikan jawabannya melalui riset atau pengumpulan data. Namun demikian, rumusan masalah lahir karena adanya masalah-masalah yang muncul dilapangan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Apakah kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang SMA Negeri 1 Kabaena dalam peningkatan mutu pendidikan?
2. Bagaimana tanggapan guru atas program peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabaena?
3. Bagaimana peran kepala Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabaena?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang SMA Negeri 1 Kabaena dalam peningkatan mutu pendidikan.
2. Tanggapan guru atas program peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabaena.
3. Peran kepala Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabaena.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dilihat manfaat atau kegunaannya, penelitian kualitatif lebih cenderung pada manfaat teoritis, yakni untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun demikian secara praktis, manfaat penelitian kualitatif yaitu untuk memecahkan masalah. Adapun nilai kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan tentang peningkatan mutu pendidikan dan peran kepala sekolah.
2. Sebagai masukan bagi praktisi pendidikan pada umumnya, dan secara khusus bagi kepala sekolah serta lembaga pendidikan yang bersangkutan, baik dalam menjalankan perannya maupun dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Sebagai bahan informasi bagi kepala sekolah dan *stakeholder* yang lain, untuk mengatasi problematika yang sama dalam i peningkatan mutu pendidikan.